

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan bisnis dan ekonomi sekarang ini sudahlah berkembang semakin pesat. Tantangan yang dihadapi oleh para pelaku bisnis pun semakin beragam, mulai dari munculnya perusahaan-perusahaan pesaing, perusahaan-perusahaan asing serta semakin maraknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta berbagai kecurangan yang dapat membahayakan harta perusahaan. Berdasarkan kondisi tersebut perusahaan perlu meningkatkan kesadaran untuk menerapkan *good corporate governance* (GCG). GCG menjadi salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global terutama bagi perusahaan yang telah mampu berkembang sekaligus menjadi terbuka. GCG merupakan sistem mengenai bagaimana suatu organisasi dikelola dan dikendalikan. Sistem *governance* antara lain mengatur mekanisme pengambilan keputusan pada tingkat atas organisasi. *Corporate governance* mengatur hubungan antar Dewan Komisaris, Direksi, dan manajemen perusahaan agar terjadi keseimbangan dalam pengelolaan organisasi. GCG adalah sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan menaikkan nilai pemegang saham serta mengakomodasikan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*) seperti kreditor, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, karyawan, pemerintah, serta masyarakat umum.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah salah satu pelaku ekonomi dengan misi yang dimilikinya saat ini menghadapi tantangan kompetisi global dunia usaha yang semakin besar. BUMN diharapkan mampu menaikkan efisiensinya sehingga menjadi unit usaha yang sehat dan memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan interaksinya dan aspek-aspek kehidupan nasional. BUMN harus peka terhadap setiap perkembangan yang terjadi dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan dunia usaha, sehingga profesionalisme BUMN disegala bidang terus meningkat, baik dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan maupun dalam bidang pengendalian dan pengawasan. Di samping itu BUMN bukan lagi anak emas perusahaan sehingga manajemen dituntut untuk lebih mandiri dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Di dalam praktiknya penerapan GCG pada BUMN bukanlah hal mudah untuk dilakukan walaupun ada beberapa BUMN yang sudah mulai memperkenalkan GCG tetapi belum menerapkannya secara menyeluruh. Penerapan GCG di dalam praktiknya merupakan hal yang mendesak, hal ini dikarenakan sistem pengelolaan yang tidak professional. Prinsip-prinsip GCG ini dapat diterapkan dengan baik apabila perusahaan juga memiliki pengendalian internal yang baik. GCG merupakan alat pengendalian internal yang berperan penting untuk mengurangi masalah yang timbul dalam perusahaan, karena GCG bermanfaat untuk perbaikan komunikasi, meminimalkan benturan, fokus pada strategi utama, serta peningkatan kepuasan pelanggan dan perolehan kepercayaan investor (*stakeholders*). Pengendalian internal memiliki peran yang penting terhadap penerapan GCG, sehingga harus difungsikan sebagai

penilaian yang independen dalam membantu manajemen melaksanakan tanggung jawabnya.

Berkaitan dengan hal variabel yang penulis pilih yaitu *Good Corporate Government* (GCG), fenomena ini berasal dari PT Kereta Api Indonesia sebagai berikut:

Menerapkan proses *Good Corporate Governance* dalam suatu perusahaan bukanlah merupakan suatu proses yang tidak mudah. Diperlukan konsistensi, komitmen, dan pemahaman yang jelas dari seluruh bagian di perusahaan mengenai bagaimana seharusnya proses tersebut dijalankan. Apabila ketiga hal tersebut di atas masih belum dimiliki oleh perusahaan, maka dapat dipastikan bahwa *Good Corporate Governance* bagi perusahaan hanya sebagai pemenuhan peraturan (formalitas) dan belum dapat dianggap sebagai bagian dari sistem pengawasan efektif.

Untuk memahami akar dari permasalahan yang terjadi, perlu dikaji beberapa hal yang signifikan terkait dengan masalah ini, yang mungkin merupakan sumber permasalahan dari tidak berjalannya mekanisme pengawasan di PT KAI. Misalnya, bagaimana proses penyusunan laporan keuangan yang berjalan selama ini? Apakah Komisaris (termasuk Komite Audit) terlibat didalamnya? Mengapa Komisaris baru dapat mengidentifikasi permasalahan setelah laporan keuangan selesai diaudit oleh auditor eksternal? Bagaimana proses dan kualitas internal control yang ada? Apakah Komisaris dan Komite Audit berperan secara optimal dalam melakukan pengawasan. Untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut, harus membahas proses *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Direksi, Komisaris, dan Komite Audit, khususnya dalam membangun pengawasan yang efektif.

Contohnya adalah kasus audit umum yang dialami oleh PT Kereta Api Indonesia (PT KAI). Kasus ini menunjukkan bagaimana proses tata kelola yang dijalankan dalam suatu perusahaan dan bagaimana peran dari tiap-tiap organ pengawas dalam memastikan penyajian laporan keuangan tidak salah saji dan mampu menggambarkan keadaan keuangan perusahaan yang sebenarnya. Kasus PT KAI berawal dari perbedaan pandangan antara Manajemen dan Komisaris, khususnya Ketua Komite Audit dimana Komisaris menolak menyetujui dan menandatangani laporan keuangan yang telah diaudit oleh Auditor Eksternal. Komisaris meminta untuk dilakukan audit ulang agar laporan keuangan dapat disajikan secara transparan dan sesuai dengan fakta yang ada. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kasus PT KAI adalah rumitnya laporan keuangan PT KAI. Perbedaan pandangan antara manajemen dan komisaris tersebut bersumber pada perbedaan mengenai masalah piutang PPN, masalah beban ditangguhkan, masalah persediaan dalam perjalanan, masalah uang muka gaji, masalah Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYDBS) dan Penyertaan Modal Negara (PMN).

Beberapa hal yang direfentifikasi turut berperan dalam masalah pada laporan keuangan PT KAI Indonesia, auditor internal tidak berperan aktif dalam proses audit, yang berperan hanya auditor Eksternal, komite audit tidak ikut serta dalam proses penunjukkan auditor sehingga tidak terlibat proses audit, manajemen (tidak termasuk auditor eksternal) tidak melaporkan kepada komite audit dan komite audit tidak menanyakannya, adanya ketidakpercayaan manajemen akan laporan keuangan yang telah disusun, sehingga ketika komite audit mempertanyakan manajemen merasa tidak yakin. Terlepas dari pihak mana yang benar, permasalahan ini tentunya didasari oleh tidak berjalannya fungsi *check and balances* yang merupakan fungsi substantif dalam perusahaan. Yang terpenting adalah mengidentifikasi kelemahan yang ada sehingga dapat dilakukan penyempurnaan untuk menghindari munculnya permasalahan yang sama di

masa yang akan datang. Dalam bidang *corporate governance*, komite audit bertanggungjawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan melakukan pengawasan efektif terhadap benturan atau potensi benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan dan manajemen perusahaan. (www.academia.edu)

Fenomena kedua berasal dari PT Katarina, fenomena yang terjadi sebagai berikut: Kasus Pelanggaran *Good Corporate Governance* oleh PT. Katarina Utama Tbk. berkaitan dengan Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip GCG:

1. Keadilan/Kewajaran (*Fairness*)

PT Katarina Utama tidak memperlakukan secara adil para pemangku kepentingan baik primer maupun sekunder, investor tidak diperlakukan secara adil dan tidak ada keadilan pula bagi karyawan, saya mengambil salah satu contoh yang sangat jelas yaitu pada pemotongan gaji untuk asuransi jamsostek para karyawan, telah dipaparkan diatas bahwa para karyawan yang tidak mengikuti asuransi jamsostek gajinya tetap ikut dipotong tanpa alasan yang jelas. Selain itu cabang RINA di Medan telah melakukan penutupan secara sepihak tanpa menyelesaikan hak hak para karyawan dengan tidak membayar gaji sesuai dengan pengorbanan yang telah mereka berikan kepada PT Katarina Utama, terbukti bahwa manajemen RINA melanggar prinsip Keadilan.

2. Prinsip Transparansi (Keterbukaan)

PT Katarina Utama tidak menyampaikan informasi dengan benar, seperti yang telah disampaikan di atas Manajemen RINA telah memasukkan sejumlah piutang fiktif guna memperbesar nilai aset perseroan, sehingga

informasi yang diterima oleh para pemangku kepentingan menjadi tidak akurat yang mengakibatkan para pemangku kepentingan seperti investor menjadi salah mengambil keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa PT Katarina Utama telah melanggar prinsip Transparansi (Keterbukaan) dalam penyampaian informasi.

3. Prinsip Akuntabilitas

Telah terbukti bahwa Katarina Utama tidak merealisasikan dana hasil IPO sesuai dengan prospektus perseroan dan melakukan penyelewengan dana untuk kepentingan pribadi direktur, sehingga terjadi ketidak efektifan kinerja perseroan. Laporan Keuangan yang dihasilkannya pun menjadi tidak akurat dan tidak dapat dipercaya. Hal ini jelas menjadi bukti bahwa PT Katarina Utama gagal dalam menerapkan prinsip akuntabilitas.

4. Prinsip Responsibilitas (Tanggung Jawab)

PT Katarina Utama Jelas sangat melanggar prinsip Responsibilitas dengan melakukan penyelewengan dana milik investor publik hasil IPO sebesar Rp 29,04 miliar, Manajemen RINA juga tidak menyelesaikan kewajibannya kepada karyawan dengan membayar gaji mereka, selain itu RINA tidak membayar tunggakan listrik sebesar Rp 9 juta untuk tagihan selama 3 bulan berjalan. Berdasarkan informasi yang dihimpun Seputar Indonesia (SI), sebagian besar direksi dan pemangku kepentingan perseroan dikabarkan telah melarikan diri ke luar negeri. Hal ini jelas menggambarkan bahwa RINA melanggar Prinsip Responsibilitas.

5. Prinsip Kemandirian

Dengan adanya penyelewengan dana hasil IPO membuat perseroan menjadi tidak efektif dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, tidak mampu membayar gaji karyawan, dan tidak mampu membayar tunggakan listrik PLN sehingga menyebabkan ditutupnya cabang PT Katarina Utama di Medan. Hal ini lah yang menyebabkan PT Katarina Utama tidak dapat melaksanakan prinsip kemandirian.

(Sumber: <http://muthiadewi28.blogspot.co.id/2012/10/good-corporate-governance-gcg.html>)

Fenomena ke tiga berasal dari Perusahaan peternakan ayam Malaysia-Indonesia (PT. Malindo) yang berlokasi di Desa Cipeundeuy Kecamatan Bojong dianggap melanggar ketentuan Good Corporate Governance (GCG). Kepala Bidang Konserpasi Reboisasi Sumberdaya Alam (Kabid KRSDA) Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Purwakarta, Jaenudin, SH mengatakan, dari analisis yang telah dilakukan terhadap PT. Malindo dapat disimpulkan, bahwa perusahaan tersebut tidak memperhatikan amdal, keamanan lingkungan, dan kesesuaian diri dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat setempat. “Tidak ada responsibility di perusahaan tersebut, Di sini perusahaan harus memperhatikan amdal kajian mengenai dampak besar dan pentingnya suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha,” kata Kabid, belum lama ini. Menurutnya, diduga perusahaan juga telah melanggar PP 34/2008 Tentang Air. Pasal 50 tentang penyediaan air. Dalam pasal 47 ayat 3 huruf b

dijelaskan, juga didalam pasal 61-65 dan pasal 66 tentang pengendalian daya rusak yang diatur dalam peraturan Kementerian Lingkungan Hidup.

“Begitu juga didalam bab IV di jelaskan tentang perijinan atau tata cara memperoleh perijinan yang di atur dalam pasal 67 ayat 1, bahwa untuk memperoleh ijin pemakaian air tanah atau penggunaan air tanah setiap pemohon secara tertulis wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati atau walikota dengan tembusan kepada menteri dan gubernur serta harus melampirkan peruntukannya karena di dalam Bab VIII juga ada yang di sebut sanksinya,” beber Jaenudin. Dia katakan berikutnya, PT. Malindo juga terancam dicabut ijinnya, sesuai dengan pasal 92 ayat 1 dan ayat 2 bahwa bupati atau walikota akan memberikan sanksi kepada setiap pemegang ijin yang melanggar ketentuan sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 67, 70, 71, 77 dan pasal 78. “Sanksi yang diberikan meliputi, peringatan tertulis, selama tiga kali dalam sebulan. Penghentian sementara seluruh kegiatan selama tiga bulan dan terakhir sanksi berupa penutupan ijin perusahaan,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Desa Cipeundeuy Kecamatan Bojong, Usep mengatakan, PT. Malindo adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang peternakan ayam yang telah beroperasi diwilayah Kampung Pasir Madang RT05 RW03 Desa Cipeundeuy.

“Perusahaan tersebut bermasalah terkait pengeboran air tanah, selain pengelolaan limbah tidak dikelola dengan baik, persoalan dengan warga sekitar pun tak henti-hentinya muncul, warga masyarakat kampung pasir madang dan sekitarnya mempertanyakan CSR juga belum ada kejelasan hingga kini,” ungkap

Kades. Padahal, perusahaan tersebut sudah berdiri serta mengelola peternakan ayam sejak 1994 sampai dengan sekarang dengan produksi dari petelur hingga penetasan ayam. “Jika berbicara terkait CSR, perusahaan tidak memenuhi kesepakatan, artinya pembagiannya tidak sesuai seperti undang-undang yang mengatur tentang pembagian hasil,” ujar Usep. (CN-01).

Sumber:(<http://www.cidahu.com/2016/03/3719/pt-malindo-dianggap-langgar-gcg/>)

Peran auditor internal yang independen sangat penting dalam penerapan GCG di perusahaan, dimana anggota auditor internal tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan tersebut, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan direksi, komisaris dan pemegang saham utama perusahaan tersebut, dan tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan tersebut. GCG juga menuntut sejauh mana Auditor Internal dapat berperan dengan baik untuk mewujudkannya pada sektor publik maupun pada sektor swasta. Auditor Internal dituntut untuk menyediakan informasi mengenai kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal yang ada di dalam perusahaan. Auditor Internal haruslah seseorang yang mempunyai kompetensi di bidang keuangan, kerana Auditor Internal lebih berperan untuk mengawasi kegiatan manajemen, kompetensi di bidang audit merupakan suatu keharusan bagi seseorang yang akan melakukan tugasnya di bidang audit. Disamping pengetahuan di bidang audit, auditor tentunya diharapkan mempunyai pengetahuan yang memadai dalam substansi yang diaudit karena itulah kompetensi anggota internal audit sangat diperlukan untuk menjembatani

kebutuhan Dewan Komisaris akan peran auditing dan pengendalian internal yang efektif dengan kendala daya serap terhadap masalah-masalah yang teknis dalam akuntansi, auditing dan pengendalian internal.

Auditor Internal yang independen dapat berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktik-praktik dalam penerapan prinsip-prinsip GCG di dalam perusahaan yang meliputi: akuntabilitas (*accountability*), pertanggung-jawaban (*responsibility*), keterbukaan (*transparency*), kewajaran (*fairness*) serta kemandirian (*independency*), merupakan upaya agar tercapainya keseimbangan antar kepentingan dari para *stakeholder*, karyawan perusahaan, *suppliers*, pemerintah, konsumen yang merupakan indikator tercapainya keseimbangan kepentingan, sehingga benturan kepentingan yang terjadi dapat diarahkan dan dikontrol serta tidak menimbulkan kerugian pada masing-masing pihak.

Prinsip-prinsip GCG ini dapat diterapkan dengan baik apabila perusahaan juga memiliki pengendalian internal yang baik. GCG merupakan alat pengendalian internal yang berperan penting untuk mengurangi masalah yang timbul dalam perusahaan, karena GCG bermanfaat untuk perbaikan komunikasi, meminimalkan benturan, fokus pada strategi utama, serta peningkatan kepuasan pelanggan dan perolehan kepercayaan investor (*stakeholders*). Pengendalian internal memiliki peran yang penting terhadap penerapan GCG, sehingga harus difungsikan sebagai penilaian yang independen dalam membantu manajemen melaksanakan tanggung jawabnya.

Profesi internal auditor sangat dituntut akan kemampuannya memberikan jasa yang terbaik dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh manajemen tertinggi suatu organisasi. Peningkatan pengawasan internal di dalam suatu organisasi tentunya menuntut tersedianya internal audit yang baik, agar terciptanya suatu proses pengawasan internal yang baik pula. Masalah yang kemudian timbul berkaitan dengan peran internal audit adalah seberapa besar keberadaan internal audit dalam memberikan nilai tambah (*value added*) bagi perusahaan. Peran auditor internal yang independen akan sangat penting dalam penerapan GCG di perusahaan, dimana anggota auditor internal tidak mempunyai hubungan dengan direksi, komisaris dan pemegang saham utama perusahaan tersebut, dan tidak memiliki hubungan usaha dengan perusahaan tersebut. Sehingga auditor internal dapat berperan dengan maksimal dan baik untuk mewujudkan GCG pada sektor publik. Auditor internal dituntut untuk menyediakan informasi mengenai kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal yang ada di dalam perusahaan. Auditor internal haruslah seseorang yang mempunyai kompetensi di bidang audit dan keuangan. Selain pengetahuan di bidang audit, auditor internal diharapkan mempunyai pengetahuan yang memadai dalam organisasi yang diaudit karena akan memudahkan dalam melakukan audit (Trimanto dan Lena, 2010). Pemeriksaan intern yang baik dalam *good corporate governance* akan dapat memperbaiki proses dan pengendalian manajemen sehingga membantu manajemen untuk memaksimalkan kinerja ekonomi perusahaan untuk keuntungan perusahaan dan para pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Tanpa pemeriksaan intern yang baik, dewan komisaris atau pimpinan unit tidak memiliki

informasi intern yang memadai mengenai kinerja organisasi ,Sehubungan dengan pentingnya pelaksanaan audit internal dalam perannya dalam mewujudkan *good corporate governance* seperti apa yang telah penulis uraikan, penulis merasa tertarik untuk lebih lanjut mengetahui bagaimana pelaksanaan audit internal dalam mewujudkan *good corporate governance*.

Berdasarkan penelitian terdahulu faktor-faktor yang mempengaruhi *Good Corporate Governance* adalah Audit Internal yang diteliti oleh Siti Kurnia (2014), Maylia P.S (2012), Dhimas P.N (2012), Puspita Putri (2012), Vicky Dzaky (2014). Faktor kedua adalah Komite Audit yang diteliti oleh Niken Anamukti (2015), Marcelinus S.N (2014). Faktor Ketiga adalah Pengendalian Internal yang diteliti oleh Siti Kurnia (2014), Niken Anamukti (2015), Putri Puspita (2012). Faktor keempat adalah Pengawasan Intern yang diteliti oleh Marcelinus S.N (2014). Berikut ini merupakan tabel faktor-faktor penelitian terdahulu yang menunjukkan *Good Corporate Governance*:

Tabel 1.1
Faktor Yang Mempengaruhi *Good corporate Governance*

No	Nama Peneliti	Tahun	Komite Audit	Audit Internal	Pengendalian Intenal	Pengawasan Intern
1	Siti Kurnia	2014	–	√	√	–
2	Niken Anamukti	2015	√	×	√	–
3	Marcelinus S.N	2014	√	–	–	√
4	Maylia P.S	2012	–	√	–	–
5	Putri Puspita	2014	–	√	–	–
6	Dhimas P.N	2012	–	√	√	–
7	Vicky Dzaky	2014	–	√	–	–

Keterangan:

- √ = Berpengaruh signifikan
- ×
- = Tidak Diteliti

Penelitian ini merupakan penelitian gabungan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Vicky Dzaky (2014) dan Latifah Agustin (2010). Penelitian yang dilakukan oleh Vicky Dazky (2014) berjudul Peran Audit Internal dalam mewujudkan *Good Corporate Governance (GCG)*. Penelitian dilakukan pada PDAM Tirtawening Bandung. Jumlah sampel penelitian ini berjumlah 34 orang yang diambil dengan teknik *simple random sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan peran audit internal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kota Bandung, berdasarkan hasil rekapitulasi responden mengenai peran audit internal di PDAM Tirtawening di Kota Bandung menunjukkan bahwa peran auditor internal yang di ukur 4 indikator yaitu indikator independensi, kemampuan profesional, lingkup pekerjaan, dan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan termasuk ke dalam kategori baik. Kedua, berdasarkan rekapitulasi jawaban responden mengenai *Good Corporate Governance* di PDAM Tirtawening Kota Bandung menunjukkan bahwa yang diukur dari 5 indikator yaitu indikator keterbukaan, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung-jawaban, dan kewajaran termasuk dalam kategori baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Latifah Agustin (2010) yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas audit internal dalam mewujudkan *good corporate governance*. Penelitian dilakukan pada perbankan di kota Jakarta. Jumlah sampel penelitian berjumlah 37 orang yang diperoleh dengan teknik *convenience sampling*. Hasil penelitian menunjukkan auditor internal dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk selalu profesional dalam tugas nya menjalankan tugas pada perusahaan serta dapat berperan dalam mewujudkan tata

kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance*. Kehadiran auditor internal diharapkan dapat memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, karena itulah diperlukan auditor internal yang memiliki kompetensi yang memadai dan independensi agar dapat melakukan pengawasan, menegakan peraturan, dan agar menjadi penengah antara manajemen dan pihak auditor baik itu internal maupun eksternal. Namun apabila seorang auditor kurang memiliki kompetensi, lemah dalam koordinasi, serta mudah dipengaruhi maka akan berpengaruh buruk bagi proses *good corporate governance*, sebab perusahaan akan menjadi tidak transparan dan rawan akan tindak kecurangan. Apabila hal hal tersebut dibiarkan akan membuat perusahaan pailit dan akan merugikan para *stakeholder* . oleh karena itu auditor internal harus memiliki kompetensi yang baik dan sifat independensi sehingga akan mewujudkan suatu *good corporate governance*.

Penulis menggunakan penelitian terdahulu dimaksudkan untuk dijadikan bahan pertimbangan karena adanya beberapa persamaan. Selain teradapt persamaan, penelitian ini juga mempunyai beberapa perbedaan dengan dua penelitian di atas, yaitu:

No	Objek Perbedaan	Vicky Dzaky (2014)	Latifah Agustin (2010)	Ridwan Hafizh (2016)
1	Variabel Independen	independensi, kemampuan profesional, lingkup	Independensi dan kemampuan profesional	independensi, kemampuan profesional, lingkup

Tabel 1.2
Perbedaan dengan penelitian yang direplikasi

		pekerjaan, pelaksanaan kegiatan pemeriksaan		pekerjaan, pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, dan manajemen bagian audit internal
2	Tempat Penelitian	PDAM Tirtawening Kota Bandung	Perbankan di Kota Jakarta	PT KAI Kota Bandung
3	Unit Analisis	Divisi Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang bekerja di PDAM Tirtawening Kota Bandung	Auditor yang bekerja di perbankan Kota Jakarta	Bidang SPI yang ada di PT KAI Kota Bandung
4	Teknik Sampling	<i>Simple random sampling</i>	<i>Convinence sampling</i>	<i>Purposive sampling</i>
5	Jumlah sampel	34	37	35

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian mengenai Audit dan menuangkannya ke dalam laporan skripsi yang berjudul **“PENGARUH AUDIT INTERNAL TERHADAP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (STUDI PADA PT KAI KOTA BANDUNG)”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian

Tata kelola perusahaan pada saat ini kurang menunjukkan cara yang baik dikarenakan oleh kurang baiknya penerapan GCG. Kurang baiknya penerapan GCG di Indonesia dapat dilihat dari kasus kurang baiiknya proses penyusunan laporan keuangan dan koordinasi yang kurang baik juga antara komisaris, direksi,

dan pemegang saham. Peran auditor internal yang independen akan sangat penting dalam penerapan GCG di perusahaan, dimana anggota auditor internal tidak mempunyai hubungan dengan direksi, komisaris dan pemegang saham utama perusahaan tersebut, dan tidak memiliki hubungan usaha dengan perusahaan tersebut. Sehingga auditor internal dapat berperan dengan maksimal dan baik untuk mewujudkan GCG. Pemeriksaan intern yang baik dalam *goodcorporate governance* akan dapat memperbaiki proses dan pengendalian manajemen sehingga membantu manajemen untuk memaksimalkan kinerja ekonomi perusahaan untuk keuntungan perusahaan dan para pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Tanpa pemeriksaan intern yang baik, dewan komisaris atau pimpinan unit tidak memiliki informasi intern yang memadai mengenai kinerja organisasi ,Sehubungan dengan pentingnya pelaksanaan audit internal dengan perannya dalam mewujudkan *good corporate governance* yang baik.

1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini agar dapat mencapai sasaran dalam penyusunan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana audit internal pada PT KERETA API INDONESIA.

2. Bagaimana *good corporate governance* pada PT KERETA API INDONESIA.
3. Seberapa besar pengaruh audit internal terhadap *good corporate governance* pada PT KERETA API INDONESIA.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan ini. Beberapa pihak yang dapat mengambil manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis audit internal pada PT KERETA API INDONESIA.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis *good corporate governance* pada PT KERETA API INDONESIA.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh audit internal terhadap *good corporate governance* pada PT KERETA API INDONESIA.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi beberapa pihak, antara lain:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat dijadikan referensi sehingga menambah pengetahuan dalam hal penerapan audit internal dalam mewujudkan *good corporate governance* PT KERETA API INDONESIA.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dalam pemeriksaan keuangan, khususnya mengenai pengaruh audit internal dalam upaya mewujudkan *good corporate governance*, serta sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan.
- b. Bagi Instansi pendidik, masyarakat akademik pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya sebagai bahan referensi bagi yang melakukan penelitian lebih lanjut berkenan dengan masalah ini.
- c. Bagi perusahaan BUMN, penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi perusahaan-perusahaan BUMN mengenai masalah pengaruh audit internal dalam mewujudkan *good corporate governance*.

1.5 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada salah satu Perusahaan BUMN di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Kota Bandung yang beralamat Jl. Perintis Kemerdekaan. No.1 Bandung. Adapun waktu penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pada bulan Agustus 2016 sampai dengan selesai.

